

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Menjelang sidang umum PBB pada bulan September 2005, beberapa negara anggota tengah mempersiapkan diri berkaitan dengan adanya rencana reformasi dalam tubuh organisasi organisasi tersebut. Salah satu lembaga PBB yang akan direformasi itu adalah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan ini akan direformasi berkaitan dengan keanggotaan dewan tersebut.

Selama ini, keanggotaan Dewan keamanan PBB terdiri dari 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Lima negara anggota tetap ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Cina. Negara-negara tersebut memiliki hak istimewa berupa hak veto sebagai hadiah kehormatan bagi pemenang Perang Dunia II. Sedangkan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB berasal dari negara-negara anggota PBB yang dipilih secara bergilir setiap 2 tahun.

Saat ini rencana reformasi Dewan Keamanan PBB telah dan masih terus disosialisasikan oleh fungsionaris PBB di berbagai negara. Tentang reformasi Dewan Keamanan PBB ini, muncul dua opsi tentang rencana perubahan keanggotaan yang akan dilakukan. *Pertama*, merubah keanggotaan Dewan Keamanan PBB dari 15 negara menjadi 25 negara, termasuk didalamnya 6 anggota tetap baru, dan selebihnya adalah anggota tidak tetap. Usulan ini disebut sebagai **Model A**. Model ini didukung oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-4 (Jepang, Jerman, Brazil

India). *Kedua*, menambah keanggotaan dari 15 negara menjadi 25 negara, tanpa adanya anggota tetap baru, dan hanya menambah anggota tidak tetap saja. Usulan ini disebut sebagai **Model B**. Model ini didukung oleh kelompok yang menamakan diri sebagai *Uniting For Consensus* (Argentina, Kanada, Kolombia, Kosta Rika, Italia, Kenya, Meksiko, Pakistan, Qatar, Korea Selatan, Spanyol, dan Turki).

Dari beberapa negara yang antusias terhadap perubahan tersebut, Jepang merupakan salah satu negara yang paling berambisi terhadap adanya reformasi Dewan Keamanan PBB tersebut. Saat ini, Jepang mengharapkan agar dapat duduk di kursi dewan keamanan PBB sebagai anggota tetap. Sebagai pendukung usulan model A, Jepang tengah gencar mengkampanyekan keinginannya tersebut diberbagai negara, dalam berbagai kesempatan guna mencari dukungan politik. Dalam hal ini, Jepang telah mengajukan diri sebagai calon anggota tetap dewan keamanan PBB, apabila model yang disepakati dalam sidang umum PBB tersebut adalah model A. Oleh karena itu, Jepang dan beberapa negara lainnya (kelompok G-4) giat mengkampanyekan model A yang mereka usulkan tersebut. Namun keinginan Jepang ini mendapat hambatan dari Cina yang menentang keinginan Jepang untuk masuk dalam Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB.

Dengan adanya pertentangan Cina dan Jepang dalam rencana perluasan Dewan Keamanan PBB ini, menjadi sangat menarik untuk diteliti, dipelajari dan dipahami. Oleh karena itu, penulis yang tertarik dengan hal tersebut mengangkat permasalahan ini sebagai karya tulis berupa skripsi. Maka dari itu, penulis

mengangkat judul skripsi sebagai berikut, **“Penolakan Cina Terhadap Jepang Untuk Menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB”**.

## **B. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis memiliki beberapa tujuan:

1. Untuk memenuhi mata kuliah skripsi yang digunakan sebagai kelengkapan syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Mempelajari lebih dalam tentang konflik yang terjadi antara Cina dan Jepang.
3. Menjelaskan alasan Cina menolak Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dalam rencana perluasan atau reformasi DK PBB.
4. Mempelajari dan menjelaskan aktor dan perilaku internasional yang ada dalam hubungan internasional dengan ilmu dan pengetahuan yang didapat di bangku perkuliahan, dalam rangka pengembangan wawasan dan intelektual penulis.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Dengan adanya rencana perluasan Dewan Keamanan PBB, dalam sidang umum PBB pada bulan September 2005, disambut baik oleh negara-negara anggota PBB. Setelah sekian lama berdiri, memang sudah sepantasnya lembaga ini mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan dunia saat ini. "Sekarang

saat-saat yang paling krusial dan penting bagi PBB. Inilah saatnya reformasi di tubuh PBB. Bila paket reformasi yang di tawarkan disetujui dalam sidang majelis pada September 2005 nanti, berarti inilah perubahan terbesar yang terjadi di tubuh PBB sejak 60 tahun terakhir," kata Kofi Annan.<sup>1</sup> Ide reformasi ini berawal dari pemikiran bahwa tanpa pembangunan tidak akan tercipta keamanan, dan tanpa keamanan tidak akan terlaksanan pembangunan, serta tanpa penerapan HAM dan aturan hukum, pembangunan dan keamanan tidak akan berfungsi.<sup>2</sup>

Saat ini Sekjen PBB beserta Staff-nya, sedang melakukan sosialisasi tentang rencana tersebut. Berbagai ide dan gagasan bermunculan, namun hanya dua opsi yang memiliki respon cukup baik, yaitu Model A dan Model B. Model A mengusulkan untuk merubah keanggotaan Dewan Keamanan PBB dari 15 negara menjadi 25 negara, termasuk didalamnya 6 anggota tetap baru, dan selebihnya adalah anggota tidak tetap. Model ini didukung oleh negara-negara yang tergabung dalam *kelompok G-4* (Jepang, Jerman, Brazil, India). Sedangkan Model B mengusulkan menambah keanggotaan dari 15 negara menjadi 25 negara, tanpa adanya anggota tetap baru, dan hanya menambah anggota tidak tetap saja. Model ini didukung oleh kelompok yang menamakan diri sebagai *Uniting For Consensus* (Argentina, Kanada, Kolombia, Kosta Rika, Italia, Kenya, Meksiko, Pakistan, Qatar, Korea Selatan, Spanyol, dan Turki).

---

<sup>1</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/24/0102.htm> , Minggu, 24 April 2005

<sup>2</sup> Diambil oleh Kofi Annan saat konferensi pers di Jakarta Convention Centre (JCC)

Dari kelompok model A yang telah bersedia dan mengajukan diri untuk menempati posisi anggota tetap DK PBB adalah Jepang dan Jerman. Negara yang nampak paling berambisi untuk menempati posisi yang istimewa di DK PBB tersebut adalah Jepang. Dalam berbagai kesempatan, Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi mengungkapkan keinginan negaranya tersebut untuk menduduki posisi anggota tetap DK PBB.

Jepang, setelah mengalami kehancuran saat Perang Dunia II, telah bangkit dan tumbuh menjadi negara besar dalam perekonomian. Perekonomian Jepang tumbuh dan berkembang sebagai negara industri maju dan telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi Asia dan dunia. Secara finansial, Jepang memang cukup pantas untuk menempati posisi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB. Saat ini, Jepang merupakan donatur terbesar untuk PBB, dengan menyumbang 22 % dari anggaran belanja negaranya untuk PBB.

Untuk lebih mewakili Asia dalam PBB, Jepang merasa cukup pantas untuk mendapat posisi Anggota Tetap Dewan Keamanan, yang selama ini, perwakilan Asia itu hanya ada satu yaitu Republik Rakyat Cina (RRC)

Selain itu, Jepang telah turut aktif terlibat dalam kegiatan operasi perdamaian, diantaranya adalah pengiriman pasukan militer Jepang yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB ke Afghanistan, Bosnia dan negara-negara konflik lainnya.

Cina menyambut baik tentang rencana reformasi Dewan Keamanan PBB tersebut. Cina juga mendukung Jepang untuk masuk dalam Dewan Keamanan PBB sebagai wakil dari Asia. Hal tersebut tentunya akan memperkuat posisi Asia di

lingkungan internasional. Cina beranggapan bahwa Jepang secara ekonomi layak untuk masuk sebagai Anggota DK PBB. Selain itu, Jepang merupakan salah satu donatur terbesar untuk anggaran dana PBB, dan memiliki jaringan yang cukup kuat dengan negara lainnya terutama negara berkembang di kawasan Asia, sehingga dengan masuknya Jepang di DK PBB diharapkan dapat lebih mewakili negara-negara Asia lainnya. Hanya saja dalam hal ini, Cina mendukung posisi Jepang tersebut bukan sebagai anggota tetap DK PBB, tetapi sebagai anggota tidak tetap. Sementara Jepang menginginkan posisinya sebagai anggota tetap DK PBB.

Negeri tirai bambu ini keberatan akan lamaran Jepang di DK PBB tersebut. hal ini diwakili oleh statement Dubes RRC untuk PBB, Wang Guangya yang menyatakan bahwa ini merupakan langkah yang berbahaya dan jelas Cina menentangnya, ini akan memecah lembaga dan menghancurkan persatuan serta menyimpangkan seluruh proses pembicaraan mengenai reformasi besar-besaran di PBB.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Mengapa Cina menolak Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang akan dilakukan perluasan atau reformasi keanggotaan tersebut?

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

Untuk membahas dan menganalisa permasalahan dalam suatu penelitian, biasanya diperlukan adanya suatu bentuk teoritis yang dapat menjembatani pokok permasalahan kepada hipotesis yang telah dimajukan

Sebagai landasan teori dan kerangka berpikir dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan Teori Persepsi dan Konsep Kepentingan Nasional karena penulis menganggap konsep dan teori ini memiliki dasar pemikiran yang relevan dengan pokok permasalahan yang ada.

## 1. Teori Persepsi

Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, penulis uraikan definisi teori persepsi yang dikemukakan oleh Ole R. Holsti yang mengasumsikan bahwa:

*Perilaku suatu negara tergantung pada cara pandang negara itu terhadap suatu obyek atau situasi. Persepsi ini selain mengandung nilai-nilai yang menjadi standar seseorang dalam mengartikan situasi yang dihadapinya, apakah situasi itu baik atau buruk, merupakan ancaman atau bukan, dan lain-lain, juga mengandung keyakinan tentang suatu hal yang dianggap benar, meskipun kebenaran tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.<sup>3</sup>*

Menurut Kenneth Boulding, sebenarnya kita bereaksi terhadap citra kita tentang dunia. Dunia ini nyata, sedangkan persepsi kita tentang dunia nyata ini mungkin berbeda.

*Kita harus mengakui bahwa orang-orang yang menentukan kebijaksanaan dan tindakan negara-negara tidak melakukan tanggapan terhadap fakta-fakta situasi yang "obyektif"...tetapi "citra" mereka tentang situasi itu. Yang menentukan perilaku kita adalah persepsi kita tentang dunia, bukan kenyataan dunia.<sup>4</sup>*

Walaupun mungkin salah persepsi, itu memainkan peran dalam menentukan perilaku suatu negara. Thomas Franck dan Edward Weisband, yang menekankan

---

<sup>3</sup> Ole R. Holsti, *International Politics A Framework For Analysis, Third Edition*, Prentice Hall, Mc Engel Wood Cliffs, New Jersey, 1997, hal. 367-370.

<sup>4</sup> Mochtar Mas'ud, *Teori dan Metodologi Hukum Internasional*, Dan Studi Sosial UGM

pentingnya citra juga berpendapat bahwa cara dua negara saling melihat satu sama lain sering menentukan cara mereka berinteraksi. Suatu pola kerjasama yang sistematis tidak mungkin berkembang diantara negara-negara yang masing-masing menganggap lawan sebagai jahat, agresif dan tidak bermoral.<sup>5</sup>

Dengan demikian, orang melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka “ketahui”. Tanggapan seseorang pada suatu situasi tergantung kepada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan dalam cara orang memandang “kenyataan”.

Disamping itu, suatu hal yang terkait erat dengan persepsi adalah citra yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok orang. Citra ini merupakan produk pesan-pesan yang diterima di masa lampau, namun bukan sekedar akumulasi pesan biasa, melainkan seperangkat kapital informasi yang dapat berstruktur.<sup>6</sup>

Hubungan antara citra persepsi dan perilaku dapat digambarkan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa ada semacam stimulasi yang muncul dari sebuah situasi atau keadaan. *Kedua*, muncul upaya mempersepsikan stimulasi tersebut, ini adalah proses menyeleksi, menata, dan menilai informasi yang masuk. Dan *Ketiga*, muncul upaya menafsirkan stimulasi yang telah dipersepsikan tersebut, sehingga muncul sebuah perilaku tertentu sebagai reaksi terhadap stimulasi tadi, jika citra yang dipegangnya negative, begitu pula sebaliknya. Namun ini tidak berarti konstan, perubahan suatu

---

<sup>5</sup> Mochtar Mas' oed, *op.cit*, hal. 19-20

<sup>6</sup> Herbert Kelman, dikutip dari James E. Dougherty dan Robert Pflazgraf Jr, *Contending Theories of International IP*, Lincolnt Company, New York, hal 224



citra atau persepsi mungkin saja terjadi, karena pada dasarnya citra ini bersifat dinamis, tidak permanent.<sup>7</sup>

Dari penjabaran teori persepsi diatas, kita dapat melihat perilaku dari China yang disesuaikan dengan persepsi China itu sendiri. Dalam hal ini adalah persepsi China terhadap Jepang, yang bereaksi negatif terhadap keinginan Jepang menduduki posisi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, karena citra China terhadap Jepang itu sendiri buruk. Citra buruk terhadap Jepang ini didasari oleh anggapan bahwa Jepang memiliki cita-cita ingin menguasai dunia. Jepang dikenal negara agresor yang kejam dan tidak bermoral sebagaimana pengalaman membuktikan saat Perang Dunia II, Jepang menjadi negara yang kejam terhadap daerah jajahannya.

Sikap dan persepsi China terhadap Jepang yang negatif ini dapat juga merupakan suatu kekhawatiran dari China akan pengaruh cita-cita Jepang untuk menguasai dunia ini, dapat merubah posisi China di PBB sebagai satu-satunya wakil dari Asia yang menjadi anggota tetap dalam dewan keamanan PBB, hal tersebut dapat mengurangi peran China di PBB dan tidak dapat lagi melakukan monopoli informasi di Asia.

## **2. Kepentingan nasional**

Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, penulis uraikan pengertian kepentingan nasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton<sup>8</sup>, kepentingan nasional itu adalah:

---

<sup>7</sup> Walter S. Jansen and Steve J. Rosen, *The Logic of International*, Alib Bahasa: Rudiana

*"National interest is The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conceptions of those element that constitue the state most vital needs. These include self preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic wellbeing."*

Dari konteks pengertian di atas, tersirat bahwa berbagai tindakan yang dilakukan oleh suatu negara yang telah dirumuskan dalam kebijakan luar negerinya tidak bisa terlepas dan bahkan selalu mengacu pada kepentingan nasional yang ingin diraih oleh negara tersebut. Kepentingan Nasional merupakan kebutuhan mendasar dan menjadi hal pokok yang ingin diraih oleh suatu negara, diantaranya adalah:

1. pemeliharaan diri (self-preservation),
2. kebebasan/kemerdekaan (Independence),
3. integritas wilayah (territory integrity),
4. pertahanan-keamanan (military security), dan
5. kesejahteraan ekonomi (economic well-being).

Berdasar pada beberapa poin diatas, dapat dilihat tentang kepentingan nasional Cina yang menolak Jepang untuk menjadi Anggota Tetap dalam rencana perluasan keanggotaan Dewan Kamanan PBB. China merupakan negara yang pernah menjadi negara jajahan Jepang, mengkhawatirkan apabila Jepang menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB akan kembali menguasai dunia, menjadi negara penjajahan. Terlebih lagi Jepang mempunyai cita-cita untuk dapat menguasai dunia

dengan ditandai adanya peningkatan nasionalisme orang Jepang termasuk dalam militernya.

Dengan semakin banyaknya elite politik yang menginginkan bangkitnya kembali Jepang sebagai negara yang tangguh dalam militer, maka nasionalisme di negara ini semakin meningkat. Terlebih lagi ketika Jepang telah mengubah kebijakan anti-perangnya tersebut. Meskipun secara kekuatan militer Cina lebih kuat, namun kekhawatiran dan trauma terhadap penjajahan Jepang dimasa lalu tetap masih ada

Sebagai negara yang telah mengalami penjajahan Jepang, Cina mengkhawatirkan tindakan Jepang tersebut merupakan tindakan untuk membuktikan diri bahwa Jepang akan mewujudkan cita-citanya tersebut untuk menguasai dunia. Dengan masuknya Jepang menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, bisa jadi itu merupakan suatu ancaman bagi Cina atas pengaruh kekuasaannya di Asia atau di Dewan Keamanan PBB itu sendiri.

## **F. Hipotesa**

Sesuai dengan pokok permasalahan dan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut:

China menolak keinginan Jepang menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, karena hal tersebut dapat merugikan posisi China dalam Dewan Keamanan PBB. China menganggap bahwa Jepang secara moral tidak pantas menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB karena sikap Jepang dimasa lalu yang kejam, agresor

tidak bermoral dan Jepang merupakan negara yang kalah dalam Perang Dunia II, sehingga tidak pantas untuk menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penulisan berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan diangkat dalam sebuah karya ilmiah. Dengan demikian, pembahasan tidak mengalami perluasan, yang dapat menyebabkan hasil dari penulisan menjadi kurang terfokus, rancu, dan kurang ilmiah tentunya.

Untuk itu, jangkauan penulisan dalam karya ilmiah ini dibatasi pada topik yang diangkat oleh penulis, yaitu dari tahun 2000, dimana saat itu PBB mulai mensosialisasikan tentang rencana reformasi di tubuh PBB oleh Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan, sampai sekarang (2000 sampai dengan sekarang).

### **H. Metode Penelitian**

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan pada kerangka pemikiran atau teori, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan Library Research atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mencari data-data sekunder berupa buku-buku, literatur, artikel, majalah, surat kabar, berita, browsing internet, serta catatan-catatan informasi lainnya.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, kerangka pemikiran yang digunakan dan hipotesa sementara.

### **BAB II : Gambaran Umum Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Bab ini meliputi tentang Sejarah Singkat PBB, Dewan Keamanan PBB, dan rencana perluasan anggota Dewan Keamanan PBB.

### **BAB III : Gambaran Umum Negara Cina dan Jepang**

Bab ini menjelaskan tentang negara Cina dan Jepang yang berdasar pada bidang politik, ekonomi, dan sosial masyarakat.

### **BAB IV : Persepsi Cina atas Jepang dalam Rencana Reformasi Dewan Keamanan PBB.**

Bab ini menjelaskan tentang persepsi Cina atas Jepang yang mencalonkan diri untuk menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB.

### **BAB V : Kesimpulan**

Berisikan tentang kesimpulan dari seluruh bab pada karya tulis ini